

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem keuangan negara-negara berkembang termasuk Indonesia berbasiskan perbankan (*bank based*). Hal ini tercermin pada besarnya pembiayaan sektor riil yang bersumber dari pembiayaan perbankan. Data Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia (SEKI) menunjukkan komposisi pembiayaan eksternal untuk bisnis keuangan non bank terbesar bersumber dari perbankan yaitu 52% dari total sumber pembiayaan, diikuti dengan penerbitan saham (36%), dan pembiayaan dari penerbitan obligasi (*bond*) serta pinjaman non bank masing-masing sebesar 6% (Soesilo, 2007).

Penyaluran kredit oleh perbankan merupakan sumber untuk pembiayaan investasi bagi sektor bisnis. Namun, sejak krisis perbankan tahun 1997, penyaluran kredit oleh perbankan nasional masih sangat lambat sehingga fungsi intermediasi perbankan yang semestinya dapat mempercepat pemulihan ekonomi nasional tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Penyaluran kredit dilihat dari *loan to deposit ratio* (LDR) masih jauh dari harapan, di awal tahun 2000-an angka LDR perbankan masih sekitar 35%, angka ini lebih didorong oleh pertumbuhan kredit konsumsi. Memasuki awal tahun 2008, LDR perbankan sedikit membaik sebesar 69%, dan meningkat menjadi 74% pada akhir tahun 2008. Namun demikian angka LDR ini masih di bawah angka ideal LDR perbankan sebesar 80% atau dari angka LDR perbankan sebelum krisis ekonomi tahun 1997 yang melebihi 90%. Rendahnya penyaluran kredit oleh perbankan, terutama untuk investasi dan modal kerja karena, pasca krisis perbankan sangat hati-hati dalam menyalurkan kredit dan masih berlangsungnya konsolidasi internal perbankan. Terjadinya *credit crunch* juga mengurangi ruang gerak bagi kebijakan moneter, karena kebijakan moneter yang menaikkan suku bunga akan mempersulit ruang gerak dunia usaha (Agenor, 2000).

Dilihat dari struktur perekonomian nasional, dari total 49,84 juta pelaku usaha pada tahun 2007, sebesar 99,74% merupakan pelaku usaha kecil dan mikro,

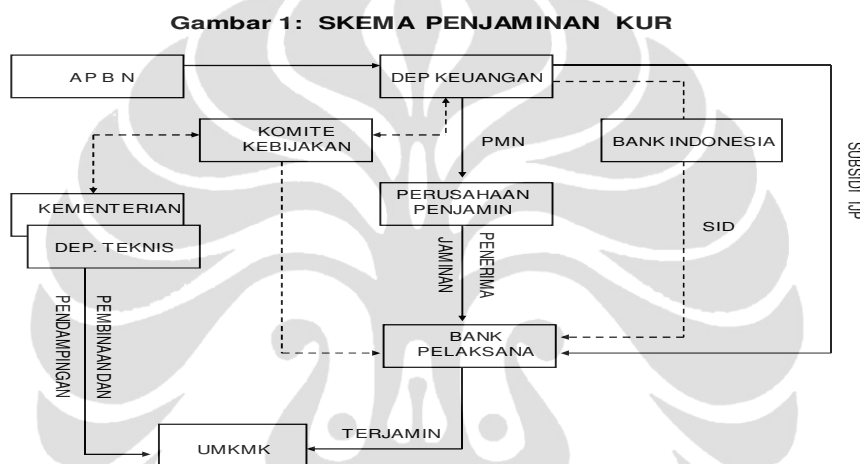
sebesar 0,24% merupakan pelaku usaha menengah, dan kurang dari 0,1% yang menjadi kelompok usaha besar (Statistik UKM Tahun 2006-2007). Kendati sektor UMKM menjadi sektor yang dominan dalam struktur perekonomian nasional, namun masih memiliki berbagai keterbatasan yang menyebabkan sektor ini sulit untuk berkembang. Beberapa masalah yang dihadapi oleh sektor UMKM dalam mengembangkan usaha adalah: *pertama*, masih sulitnya akses UMKM pada pasar, *kedua*, masih lemahnya pengembangan dan penguatan usaha, dan *ketiga*, keterbatasan akses terhadap sumber-sumber pembiayaan dari lembaga keuangan formal khususnya perbankan (Wijono, 2005).

Sejauh ini UMKM yang sebagian besar bergerak di sektor informal memiliki akses yang lemah terhadap kredit perbankan, baik disebabkan faktor internal pelaku usaha sendiri maupun alasan persyaratan administrasi perbankan. Pada hal sektor UMKM memiliki peran yang besar dalam perekonomian nasional, baik dalam memberikan kontribusi terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) maupun dalam penyerapan tenaga kerja. Tahun 2007 kontribusi PDB dari sektor UMKM mencapai Rp. 2.121,3 triliun atau 53,6% dari total PDB nasional sebesar Rp.3.957,4 triliun, dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 91,8 juta orang atau 97,3% dari total tenaga kerja secara nasional (Indikator Makro Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2008).

Berdasarkan data Bank Indonesia, menurut platform kredit perbankan yang disalurkan pada tahun 2007 dari total kredit perbankan sebesar Rp.1.002,01 triliun, porsi kredit yang dikucurkan untuk kelompok usaha mikro kecil dan menengah sebesar 50,18% dan kredit untuk usaha besar 49,82%. Rendahnya penyaluran kredit kepada sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), karena sektor UMKM dinilai tidak memenuhi prasyarat penyaluran kredit, salah satunya adalah masalah *collateral* atau jaminan. Akibatnya, UMKM yang sebagian besar bergerak disektor non formal kesulitan untuk mendapatkan kredit guna perluasan usaha.

Menyadari peran penting sektor UMKM di dalam perekonomian nasional, berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk menjembatani *gap* antara sektor perbankan dengan pelaku UMKM. Dengan melakukan *polling* dana pembinaan dan

pengembangan UMKM yang sebelumnya ada di Departemen/Kementerian teknis yang membina langsung pelaku UMKM, maka sejak bulan November 2007 pemerintah meluncurkan program penjaminan kredit yang dikenal dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk pelaku UMKM. Program ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari Memorandum of Understanding (MoU) antara departemen terkait dengan bank-bank pelaksana program KUR serta lembaga penjamin kredit tentang Penjaminan Kredit Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi.



Sumber: Kementerian Negara Koperasi dan UKM.

Program KUR dijalankan dengan pola penjaminan dari lembaga penjaminan yaitu PT. Askrido dan Perum Sarana Pengembangan Usaha (SPU) yang mendapatkan suntikan modal baru dari pemerintah sebesar Rp.1,45 triliun pada tahun 2008, dengan target *gearing ratio* sebesar 10 kali serta target membiayai 650 ribu debitur tahun 2008 dan menyerap satu juta tenaga kerja. Sementara itu, bank pelaksana penyaluran KUR yang ditunjuk pemerintah yaitu lima bank Persero masing-masing Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, Bank BTN, Bank Syariah Mandiri ditambah Bank Bukopin. Kerjasama antara lembaga penjamin kredit dengan bank-bank pelaksana program KUR dilakukan dengan sistem *risk sharing*, yaitu 70% risiko ditanggung oleh lembaga penjaminan dan 30% risiko ditanggung oleh perbankan. Sementara pemerintah berperan sebagai penanggung imbal jasa

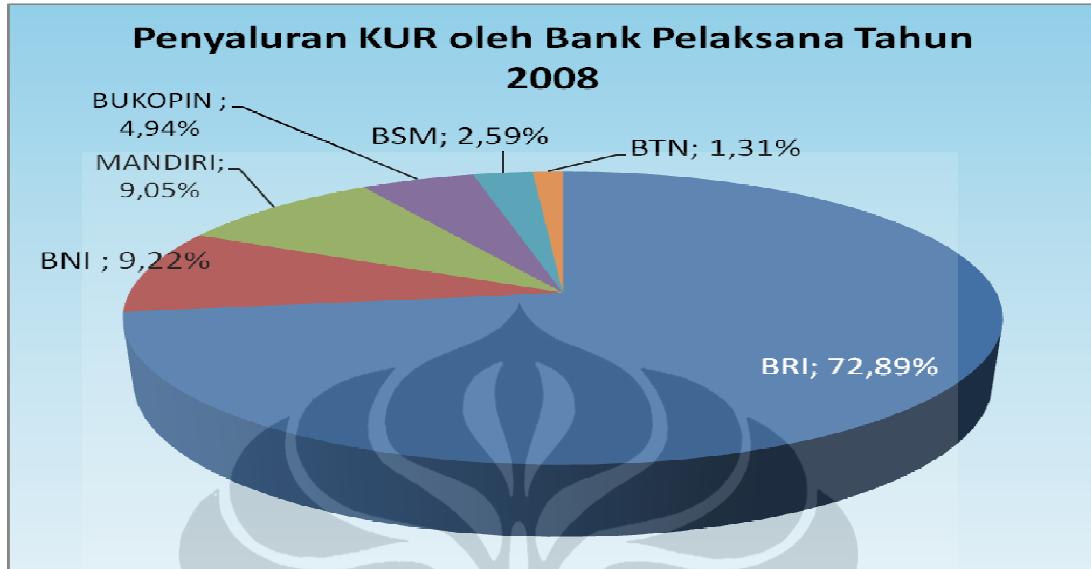
penjaminan (IJP) sebesar 1,5% dari kredit pembiayaan yang dijamin oleh Lembaga Penjaminan, dan menjadi beban APBN. Sedangkan untuk suku bunga pinjaman dari perbankan kepada UMKM ditetapkan maksimal sebesar 16% per tahun untuk pola KUR langsung, dan maksimal 24% efektif per tahun untuk pola *linkage* program dan KUR mikro. Tingkat suku bunga program KUR jauh lebih rendah dibandingkan pinjaman melalui Bank Perkreditan Rakyat (BPR) atau pun melalui lembaga non bank lainnya.

1.2 Permasalahan

Sejak diluncurkan pada akhir tahun 2007 dan efektif berjalan tahun 2008, Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) cukup mendapatkan respon positif dari masyarakat. Hal ini terlihat dari tingginya angka penyaluran KUR setiap bulannya. Namun demikian, dari enam bank pelaksana program KUR yaitu lima Bank Persero ditambah Bank Bukopin, kecepatan penyaluran kredit KUR oleh masing-masing bank cukup berbeda. Bank BRI merupakan bank pelaksana program KUR yang menyalurkan kredit terbesar sepanjang tahun 2008, yaitu sebesar Rp.9,20 triliun atau 72,89% dari total KUR yang tersalurkan sebesar Rp.12,62 triliun. Sementara Bank BTN hanya mampu menyalurkan kredit KUR sebesar Rp. 166,0 miliar atau 1,31% dari total realisasi kredit KUR. Rata-rata KUR per debitur juga sangat bervariasi di antara bank-bank pelaksana, yaitu bank BRI dengan rata-rata KUR per debitur Rp.5,96 juta dengan jumlah debitur sebanyak 1.615.979 debitur. Sementara Bank Bukopin memiliki rata-rata kredit per debitur tertinggi yaitu Rp. 211,68 juta per debitur dengan jumlah debitur 2.944 debitur. Secara nasional rata-rata kredit debitur cukup baik yaitu sebesar Rp.7,55 juta per debitur.

Pelaksanaan KUR melalui enam bank pelaksana diharapkan mampu memperbesar kredit kepada sektor UMKM. Namun berdasarkan data realisasi perbankan pada tahun 2008, porsi kredit UMKM perbankan secara nasional justru mengalami penurunan dari 50,18% pada tahun 2007 menjadi 48,48% pada tahun 2008.

Gambar 2: Realisasi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Tahun 2008 oleh Enam Bank Pelaksana



Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (data diolah)

Berdasarkan data realisasi KUR tahun 2008, terlihat kecepatan dan kemampuan masing-masing bank pelaksana program KUR sangat berbeda dalam menyalurkan KUR. Penunjukan bank pelaksana program KUR oleh pemerintah belum sepenuhnya berjalan optimal. Harapan program KUR mampu menjangkau pelaku usaha yang lebih besar belum sepenuhnya terlaksana, hal ini terlihat pada tidak tercapainya target realisasi KUR pada tahun 2008 yang ditetapkan sebesar Rp.14,5 triliun. Target realisasi KUR ini mungkin saja bisa dipenuhi jika semua bank pelaksana program KUR memiliki kecepatan dan fokus yang sama untuk menyalurkan kredit kepada sektor UMKM. Apalagi di tahun 2009 pemerintah telah menargetkan untuk meningkatkan realisasi KUR menjadi Rp. 19,5 triliun dengan adanya penambahan modal pemerintah dan premi imbal jasa penjaminan (IJP) yang dialokasikan dalam APBN tahun 2009.

Berdasarkan fakta di atas, maka penulisan ini akan meneliti dan menganalisis perilaku perbankan dalam menyalurkan kredit UMKM untuk Program Kredit Usaha Rakyat. Kemampuan masing-masing bank berbeda dalam menyalurkan kredit KUR, kendati fasilitas yang diberikan oleh pemerintah sama, yaitu tidak wajibnya prasyarat jaminan kredit. Perumusan masalah yang akan diteliti adalah:

1. Apakah KUR dapat meningkatkan porsi kredit UMKM pada masing-masing bank pelaksana KUR?
2. Apakah ketidakmerataan penyaluran KUR juga terjadi menurut sektor ekonomi dan lokasi penyaluran kredit.
3. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi perilaku perbankan dalam menyalurkan KUR?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pengaruh Program KUR terhadap porsi kredit UMKM pada masing-masing bank pelaksana KUR pada tahun 2008.
2. Menganalisis sebaran KUR menurut sektor ekonomi dan lokasi penyaluran kredit serta penyaluran kredit pada masing-masing bank pelaksana KUR.
3. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku bank pelaksana Program Kredit Usaha Rakyat dalam menyalurkan KUR kepada pelaku usaha UMKM.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, manfaat serta informasi terhadap kebijakan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diluncurkan pemerintah untuk menjembatani antara pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang tidak *bankable* namun *feasible* secara usaha. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi:

1. Pemerintah selaku pengambil kebijakan dan pengembangan Program Kredit Usaha Rakyat. Diharapkan dari hasil penelitian ini diketahui:
 - a. Pelaksanaan program KUR, sebaran kredit menurut daerah dan sektor ekonomi.
 - b. Perilaku yang mempengaruhi perbankan dalam menyalurkan KUR, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam rangka memperbesar target KUR dimasa yang akan datang.
2. Dunia akademisi sebagai bahan referensi untuk penelitian lebih lanjut.

1.5 Hipotesis

1. Hipotesis A

- a Adanya penjaminan kredit pada Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) akan meningkatkan pemberian kredit kepada sektor UMKM.
- b Pelaku UMKM yang merupakan sektor informal banyak bergerak di sektor perdagangan dan pertanian, oleh karena itu penyaluran KUR juga akan banyak kepada sektor perdagangan dan pertanian, dengan konsentrasi terbesar di Pulau Jawa.

2. Hipotesis B

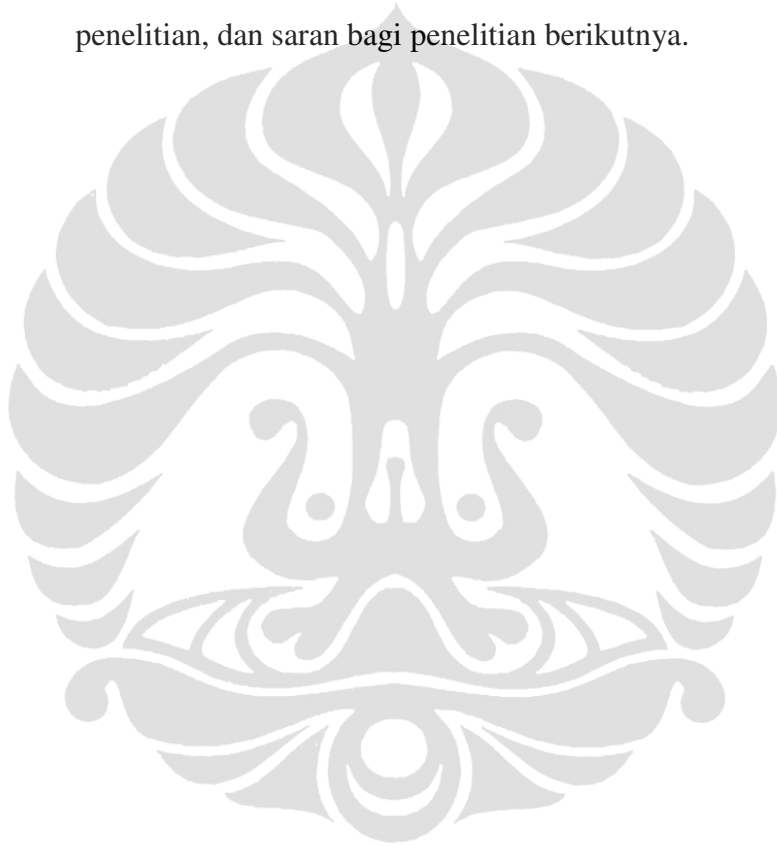
Kondisi internal dan eksternal perbankan terutama ketersediaan dana (likuiditas perbankan), besarnya kredit macet (NPL), jangkauan debitur, dan tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) akan mempengaruhi perbankan dalam menyalurkan Kredit Usaha Rakyat.

1.6 Sistematika Penulisan

- Bab I : Membahas latar belakang pemilihan judul, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan hipotesis penelitian, dan sistematika penulisan.
- Bab II : Berisikan tentang metodologi penelitian yang digunakan, tinjauan literatur, dan pembentukan model. Pada bab ini, diuraikan penelitian-penelitian terdahulu yang terkait dengan penawaran kredit perbankan. Atas dasar seleksi variabel, diperoleh fungsi penawaran kredit KUR oleh perbankan.
- Bab III : Bab ini khusus membahas tentang Program Kredit Usaha Rakyat, yang berisikan latar belakang Program KUR, ketentuan dan tata cara mengakses KUR, realisasi KUR dan analisis deskriptif terhadap pelaksanaan KUR yang dilihat dari sebaran KUR menurut bank pelaksana, sebaran KUR menurut daerah, dan sebaran KUR menurut

sektor ekonomi. Selain itu juga di analisa pengaruh Program KUR terhadap peningkatan kredit perbankan kepada sektor UMKM.

- Bab IV : Pada bagian ini dibahas tentang hasil analisis statistik dari model. Uji statistik untuk membuktikan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yaitu KUR sebagai fungsi penawaran kredit UMKM.
- Bab V : Penutup, berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang diperoleh. Juga di bahas implikasi kebijakan terhadap temuan penelitian, dan saran bagi penelitian berikutnya.



Gambar 3: Kerangka Berfikir:

